
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Terhadap Transparansi Penggunaan Dana DIPA pada Unit Kegiatan Mahasiswa Kronika IAIN Metro

Arta Marsha Putri

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : artamarshaputri@gmail.com

Irsyad Azis Ardiansyah

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : azisardiansyah272@gmail.com

Mellisa Wulandari

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : wulandarimellisa33@gmail.com

Salva Febrian Eka Putra

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : salvasil02@gmail.com

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Korespondensi penulis: artamarshaputri@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the effectiveness and efficiency of the DIPA fund financial management system on the transparency of the use of UKM kronika. This type of research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data sources used in this research are primary data through field observations and in-depth interviews, as well as secondary data from related documents. The results of the research show that the effectiveness of the DIPA Fund financial management system in chronic UKM is still not optimal, as can be seen from inadequate planning, minimal community involvement, and indications of misuse of funds. In terms of efficiency, it was found that there was convoluted bureaucracy, lack of supervision and cost control, and not optimal use of information technology.*

Keywords: *Dipa Fund, Transparency, Student Activity Unit*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan keuangan dana DIPA terhadap transparansi penggunaan UKM kronika. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber datayang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam, serta data sekunder dari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengelolaan keuangan Dana DIPA dalam UKM kronika masih belum optimal, terlihat dari perencanaan yang kurang matang, keterlibatan masyarakat yang minim, serta indikasi penyalahgunaan dana. Dalam hal efisiensi, ditemukan adanya birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengawasan dan pengendalian biaya, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

Kata Kunci: Dana Dipa, Transparansi, UKM

LATAR BELAKANG

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan minat, kemampuan, dan keterampilan tertentu. Lembaga ini bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan lain di dalam kampus, termasuk senat mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa, di tingkat program studi, fakultas, dan universitas. Lembaga ini dikelola secara mandiri dan tidak berada di bawah yurisdiksi pengurus besar atau senat mahasiswa (Sumarsono dkk., 2022).

Dana DIPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) merupakan dokumen resmi yang menampilkan pelaksanaan anggaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengesahkan dokumen tersebut. Untuk pengelolaan dan administrasi dana DIPA yang tepat, usaha kecil dan menengah harus mematuhi prosedur dan tolok ukur yang ditetapkan. (Nurjannah, 2022). Pembiayaan yang tepat yang memenuhi kebutuhan mahasiswa terkait sarana dan prasarana merupakan elemen terpenting lainnya dalam mendukung kegiatan kampus.

Alokasi dan pemanfaatan sumber daya keuangan harus efisien untuk menjawab tuntutan khusus mahasiswa. Baik Senat maupun kampus berhak atas informasi pengeluaran dan pengelolaan dana milik UMKM, oleh administrasi kampus. Opacity ini dapat mengakibatkan skeptisisme dan ketidakpercayaan para pelaku UMKM terhadap pengelolaan dana DIPA di kampus sehingga menghambat kegiatan itu sendiri (Nurfitri & Ratnawati, 2023). Meskipun pendanaan dari DIPA dalam jumlah yang besar, namun terdapat kendala dalam ketidakefektifan dan inefisiensi pengelolaannya.

Isu-isu terkait pengelolaan dana DIPA tidak hanya berkaitan dengan kurangnya keterbukaan terhadap mahasiswa tetapi juga menyentuh efikasi dan efisiensi dalam sistem pengelolaan keuangan UMKM DIPA. Meskipun alokasi dana DIPA cukup besar, namun terdapat kekhawatiran akan ketidakefektifan dan kurangnya efisiensi dari pengelolaannya dalam pelaksanaannya (Sugesti, 2019). Lebih khusus lagi, telah dilaporkan bahwa penggunaan dana DIPA tidak begitu tepat sasaran dan selaras dengan prioritas kegiatan UMKM.

Hal ini dibuktikan dengan berbagai permasalahan, seperti kurangnya perhatian terhadap perencanaan, pelaksanaan keuangan yang tidak jelas, dan terbatasnya pelatihan di kampus. Jika pernyataan tersebut benar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana tidak efektif dan dengan demikian berdampak kecil pada operasional UMKM (Tresna dkk., 2023). Selain itu, ada masalah tentang inefisiensi dalam administrasi sistem manajemen keuangan. Ini termasuk hal-hal seperti birokrasi, prosedur yang tidak jelas, atau kesalahan

saat melakukan tugas yang paling sederhana sekalipun dalam pengelolaan keuangan perusahaan kecil dan menengah. Sistem manajemen keuangan yang tidak efisien menyebabkan alokasi dana yang tidak efisien dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia kurang. (Krysovaty dkk., 2023).

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan keuangan Dana DIPA, serta dampaknya terhadap transparansi penggunaan Dana DIPA. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana Dana DIPA digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan UKM dan peningkatan kesejahteraan kegiatan mahasiswa, serta menilai tingkat efisiensi dalam sistem pengelolaan keuangan DIPA. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis hubungan antara efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dengan tingkat transparansi yang diberikan kepada kampus dalam penggunaan Dana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan Dana pada UKM Kronika, serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan

KAJIAN TEORITIS

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Menurut (Liza dkk., 2022) , kegiatan kemahasiswaan melibatkan kegiatan non-kredit yang dapat dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus. Oleh karena itu, kegiatan ini akan memenuhi syarat sebagai kegiatan ekstrakurikuler karena dimaksudkan untuk mendukung dan melengkapi kegiatan kurikulum reguler. Kategori ini mencakup kegiatan seperti pengembangan bakat, eksplorasi semangat dan minat, peningkatan penalaran dan bakat ilmiah, pengembangan kemampuan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat (Hawari dkk., 2023).

Efektivitas dan Efisiensi

(Solika dkk., 2023) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan dalam menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai hasil yang ditargetkan. Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa tugas tersebut praktis jika diselesaikan dalam waktu yang dijadwalkan, anggaran, dan standar kinerja yang berkualitas (Syam dkk., 2023). Efektivitas adalah ukuran pencapaian tujuan atau sasaran dibandingkan dengan hasil yang direalisasikan. Menurut (Lisnawati, 2023) efektivitas menggambarkan pencapaian tujuan atau target kebijakan.

Menurut Nugraha, efisiensi erat kaitannya dengan konsep produksi (Konsep dkk., 2023). Efisiensi dapat diukur melalui perbandingan output atau produksi yang dicapai dengan input atau sumber daya yang digunakan; misalnya, biaya produksi (Nugraha, 2022). Menurut Mahmudi, efisiensi merupakan perbandingan kuantitatif antara output dan input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien jika dapat mencapai hasil tertentu dengan input paling sedikit atau menggunakan input yang dapat memberikan output setinggi mungkin (Sabrina Putri dkk., 2023).

Transparansi Keuangan

Menurut (Galingging & Darmawan, 2023) transparansi merupakan tindakan suatu pemerintahan yang memungkinkan masyarakat untuk transparan terhadap informasi tentang suatu pemerintahan untuk memastikan informasi yang dibagikan oleh pemerintah tersebut akurat dan memadai. Namun penjelasan lain dari makna yang didefinisikan (Sukmadewi & Utama, 2022) transparansi merupakan administrasi yang senantiasa siap dan mau terbuka sepenuhnya dalam memberikan informasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Hamid, transparansi akan menyiratkan keterbukaan dan kesiapan akses terhadap setiap kegiatan dan kebijakan pemerintah. Menurut para ahli, transparansi mengungkapkan pelepasan informasi secara bebas tentang berbagai kegiatan administrasi pemerintah yang harus mudah diakses oleh semua masyarakat untuk pemahaman yang lebih baik.

Penerapan prinsip transparansi dalam penyediaan layanan publik dan tingkatnya dapat ditentukan dengan indikator transparansi. Indikator transparansi ini dipertimbangkan oleh (Mawarni dkk., 2024) untuk mengukur keterbukaan dalam proses penyediaan layanan publik, memahami aturan dan prosedur oleh pengguna layanan serta pemangku kepentingan lainnya, dan mengakses informasi tentang berbagai dimensi penyampaian layanan publik. Aspek lain dari indikator transparansi adalah transparansi dapat diukur dalam berbagai efisiensi tata krama, seperti: a) mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam lembaga, sehingga menunjukkan itikad baik dan dapat diandalkan, b) karakteristik akan mendorong partisipasi publik yang lebih baik dalam bisnis. dilakukan oleh lembaga, c) akan ada pemahaman publik yang lebih baik dan pengetahuan publik tentang bagaimana fungsi lembaga, dan d) secara signifikan akan mengurangi insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Muhshi, 2022).

Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan APBN pada tahun anggaran akan diawali dengan menerbitkan dan menyetujui dokumen-dokumen terkait pelaksanaan anggaran. Dokumen-dokumen tersebut adalah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (Adhawiyah, t.t.). DIPA merupakan basis kerja pelaksanaan kegiatan pemerintah berdasarkan APBN. DIPA yang telah disetujui Menteri Keuangan diserahkan kepada menteri/kepala lembaga terkait, bendahara negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dana DIPA berasal dari: 1) Dana DIPA hanya bersumber dari mata uang Indonesia, Rupiah, dan sebagian APBN, disebut APBN. 2) Uang sekolah per mahasiswa per semester Uang yang disalurkan untuk pendidikan sebagai uang sekolah dan sumbangan oleh masing-masing mahasiswa dianggap DIPA (Anggaran dkk., 2020). Dana DIPA dialokasikan berdasarkan prinsip-prinsip Tridarma Perguruan Tinggi (Ardiansyah dkk., 2022): 1) Di bidang pendidikan melalui kegiatan perolehan peralatan laboratorium dan peningkatan fasilitas pendukungnya (Merisa & Safitri, 2023); 2) Dalam bidang penelitian dalam mendukung penelitian dosen untuk menjamin tersedianya tenaga pengajar yang berkompeten. 3) Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui organisasi kemahasiswaan di kampus yang memiliki relasi nyata dengan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong tipe kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan proses pengumpulan data mentah untuk menginterpretasikan fenomena yang menjadi instrumen utama peneliti. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, mengatur, menampilkan, dan menganalisis data untuk memahami topik (Seran, 2020). Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan sumber primer yaitu diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data untuk DIPA UKM Kronika fokus pada pengumpulan informasi dan data. Analisis data berlaku untuk UMKM dalam proses pengelolaan keuangan Kronika. Memperoleh dan meninjau dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan, risalah rapat, dan proses pengelolaan keuangan UKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan pengamatan di lapangan, wawancara dengan informan kunci, dan studi dokumentasi, disadari bahwa sistem pengelolaan keuangan yang menggunakan transparansi keuangan untuk dana DIPA di UKM Kronika tidak berfungsi dengan baik. Bukti ketidakefektifan meliputi:

1. Penyusunan DIPA untuk realisasi penggunaan dana tersebut tidak sepenuhnya terkait dengan prioritas pertumbuhan kampus dan tuntutan UMKM, sehingga kurang matang dalam prosesnya. Pernyataan dari wawancara dengan ketua UKM terkait penilaian kampus tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa karya memiliki nilai yang kecil bagi mahasiswa (I. Rasyid, komunikasi pribadi, 20 Juni 2024).
2. Namun, ada masalah karena tidak melibatkan UKM dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di lokasi mana dana DIPA harus digunakan. Mereka merasa aspirasi mereka tidak tercermin dengan baik dalam menentukan lokasi proyek yang didanai DIPA.
3. Pelaporan tersebut masih belum cukup efektif dalam pengelolaan uang.
4. Kurangnya kapasitas manusia yang dibutuhkan, tenaga ahli di bidangnya, dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap sebagian besar orang dan bisnis yang meraup keuntungan dari kas negara.

Apa yang dibutuhkan uang dari anggaran tersebut adalah untuk memperbaiki situasi keuangan perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, pengelolaan usaha kecil dan menengah oleh otoritas kampus sebagai contoh pembangunan memastikan pembangunan tersebar merata, dan mahasiswa merasakan keuntungannya. Pelaku UKM merupakan bagian dari otoritas di kampus yang melengkapi pemenuhan tujuan administrasi dengan memastikan kegiatan kemahasiswaan berjalan lancar dan adanya promosi kesejahteraan yang setara. Aspek kekurangan sumber daya mendorong kebijakan yang diterapkan secara biasa-biasa saja dan tidak fokus, sehingga membatasi potensi DIPA. Inti dari manajemen adalah efektivitas.

Selanjutnya, penganggaran dana DIPA dalam rangka pengelolaan keuangan UMKM Kronika pada umumnya akan berdampak pada program kampusnya. Terwujudnya hasil yang diinginkan dari kapasitas mahasiswa UMKM dalam efektivitasnya didasarkan pada kebijakan yang dilakukan oleh pelaku utama UMKM. Jika kampus tidak beroperasi secara keseluruhan atau optimal, atau operasinya terganggu dengan cara terbaik, maka mata rantai yang lemah dapat ditunjukkan dalam alokasi dan penggunaan sumber daya anggaran yang efisien.

Efisiensi mengacu pada eksploitasi sumber daya ekonomi yang lengkap atau optimal. Efisiensi diperoleh ketika peningkatan produksi dapat diperoleh dengan tingkat sumber daya yang sama atau ketika jumlah produksi yang sama tersedia dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Pembahasan

Temuan studi tersebut menyiratkan bahwa masih ada beberapa tantangan yang dihadapi administrasi keuangan pendanaan DIPA pada UMKM di Kronika Iain Metro terkait efektivitas, efisiensi, dan keterbukaan.

1. Efektivitas pengelolaan keuangan akan sangat tinggi, tergantung pada kualitas perencanaan strategis dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dalam kasus khusus ini, perencanaan yang tidak memadai dan kegagalan untuk melibatkan siswa telah menyebabkan berkurangnya relevansi program dan kegagalan untuk memenuhi harapan mereka. Keberhasilan yang tinggi hanya dapat dicapai jika keterlibatan yang memadai dari semua pemangku kepentingan terkait melalui perencanaan strategis yang disempurnakan (Trott, 2004).
2. Perampingan birokrasi, peningkatan pengawasan, dan penerapan teknologi informasi akan menghasilkan efektivitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya pengawasan mengakibatkan pemborosan dan penggunaan uang tunai yang tidak tepat. Sistem manajemen keuangan berbasis TI akan meningkatkan efektivitas administrasi dan pelaporan keuangan (Galingging & Darmawan, 2023).
3. Transparansi dalam pencairan dana merupakan komponen penting yang akan mendorong kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Pelaporan dan ketersediaan informasi yang tidak memadai menciptakan defisit kepercayaan di antara para siswa. Transparansi tersebut dapat dicapai dengan terus memberikan laporan rinci tentang alokasi dana untuk meningkatkan keterbukaan di antara para pelaksana. Mekanisme umpan balik yang tepat memungkinkan siswa untuk menyuarakan pendapat mereka (Mawarni dkk., 2024).

Hal ini berlaku dalam hal penguatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap pendanaan DIPA di UMKM Kronika Iain Metro melalui perbaikan perencanaan dan pengawasan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, lebih banyak keterlibatan siswa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan akan sangat membantu dalam mengakomodasi semua kebutuhan dan tujuan mereka. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap situasi pengelolaan keuangan dana DIPA yang

ditujukan untuk UMKM di Kronika. Ini mengusulkan rekomendasi untuk menerapkan metode untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam manajemen keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan keuangan serta transparansi penggunaan Dana DIPA pada UKM Kronika masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Meskipun terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi, namun upaya-upaya tersebut masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan secara komprehensif, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kampus, penyempurnaan regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan DIPA, penguatan peran serta pelaku UKM, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan.

SARAN

Berikut ini adalah saran dari peneliti untuk objek penelitian yakni UKM Kronika dan IAIN Metro selaku birokrasi yang ada:

1. Perbaiki perencanaan Dana DIPA dengan melibatkan lebih banyak mahasiswa dan pengurus UKM.
2. Adakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi pengelola Dana DIPA UKM.
3. Tingkatkan transparansi dengan publikasi laporan penggunaan Dana DIPA secara berkala.
4. Sederhanakan birokrasi penggunaan Dana DIPA tanpa mengurangi akuntabilitas.
5. Perkuat sistem pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana DIPA.
6. Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelaporan keuangan.
7. Tingkatkan koordinasi antara pihak kampus, pengurus UKM, dan mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
8. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang didanai DIPA dan lakukan perbaikan berdasarkan hasilnya.

DAFTAR REFERENSI

- Adhawiya, H. (t.t.). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Studi Kasus Di Kabupaten Langkat).
- Anggaran, P., Anggaran, P., Administrasi, P., Kompetensi, D., Daya, S., Terhadap, M., Penyerapan, T., Empiris, S., Opd, K., Dumai, S., Atika, S., Harahap, Taufik, T., Nurazlina, D., Kunci, K., Tingkat, Anggaran, P., & Anggaran, P. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). 13, 2020. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i11>
- Ardiansyah, M., Suharto, T., & Farid, A. S. (2022). Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(10), 4432–4441. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.1036>
- Galingging, Y. D., & Darmawan, N. A. S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Public Trust: (Studi Pada Jemaat HKBP Cendana Nauli). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 559–570. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61616>
- Hawari, R., Hasibuan, M., Yudha Wastuti, S., & Fanreza, R. (2023). Peran Bimbingan Konseling dalam Pengembangan Bakat Peserta Didik. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, 834–842. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.338>
- Konsep, T., Aplikasinya, D., Boari, Y., Andayani, M., Novita, M., Endrawati, T., Nurfaidah, Hikmawati, I., Purwanto, S., Hasanah, T., Nurjanah, I., & Purba, O. (2023). Perencanaan Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep & Aplikasinya).
- Krysovaty, A., Zvarych, I., Brodovska, O., Shevchenko, I., & Krasnorutskyy, O. (2023). Development of Inclusive Economy as the Basis of Economic Growth of the Global Economy. *TEM Journal*, 12, 936–947. <https://doi.org/10.18421/TEM122-40>
- Lisnawati, T. (2023). Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja dengan Efektifitas Kerja Dosen di AMIK Citra Buana Indonesia Sukabumi. *JURNAL BUANA INFORMATIKA CBI*, 6, 165–178. <https://doi.org/10.53918/bi.v6i2.57>
- Liza, N., Andriani Farida, I., Priyambodo, A., & Tri Harsono, Y. (2022). Hubungan Antara Self Regulated Learning Dan Konflik Peran Pada Mahasiswa Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Malang. *Flourishing Journal*, 2, 257–266. <https://doi.org/10.17977/um070v2i42022p257-266>
- Mawarni, A., Kunci, K., Transparansi, Pemerintah, K., Pemerintah, K., & Publik, S. (2024). Literature Review: Perwujudan Nilai Transparansi Pada Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia.
- Merisa, N., & Safitri, B. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di Sekolah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.218>
- Muhshi, A. (2022). Asas Praesumptio Iustae Causa dalam Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan.

- Nugraha, M. (2022). Analisis Determinan Efisiensi Perbankan Dengan Data Envelopoment Analysis: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Gici Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 66–73. <https://doi.org/10.58890/jkb.v14i1.12>
- Nurfritri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *jesya*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259474137>
- Nurjannah, D. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Untuk Satuan Kerja Intelkam Polres Labuhanbatu Berbasis Web. *INFORMATIKA*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.36987/informatika.v10i1.2584>
- Rasyid, I. (2024, Juni 20). Wawancara dengan Ketua UKM Kronika [Langsung].
- Sabrina Putri, Adhe Eva Yolanda, Haryati, Ayulia Indah Utami, Rizka Anisa Putri, & Alwi Alwilo Haryada. (2023). Penerapan Sistem Cloud Computing Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Sibolga Tapteng (KAMISTA) dengan Menggunakan Layanan Google Drive. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (JUKTISI)*, 2(1), 222–231. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i1.54>
- Seran, S. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*. Deepublish.
- Solika, R., D. A., Lee, M., & Trisno, I. (2023). Sistem Unit Kegiatan Mahasiswa Berbasis Web di Universitas Widya Kartika. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 6, 757–766. <https://doi.org/10.32672/jnkti.v6i6.7202>
- Sugesti, A. D. (2019). Akuntabilitas Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:195464847>
- Sukmadewi, Y. D., & Utama, K. W. (2022). Relevansi Undang—Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan. *Law, Development and Justice Review*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.14054>
- Sumarsono, A., Hermansyah, A. K., & Supriyadi, S. (2022). Analisis Hambatan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Atletik. *JURNAL PENJAKORA*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/penjakora.v9i1.46268>
- Syam, A., Nurlila, R., & Risky, S. (2023). Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Pencapaian Indikataor Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan di Puskesmas Kabupaten Kolaka. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6, 1213–1226. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i7.3558>
- Tresna, M. F., Kridantika, W. S., Ageng, Y. R., & Firmansyah, A. (2023). Kinerja Keuangan Dan Kinerja Layanan Dalam Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnalku*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.376>
- Trott, P. (2004). *Innovation Management And New Product Development*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:166826639>